

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian terhadap karya ilmiah sebelumnya, yang terkait dengan penelitian yang hampir sama. Untuk menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi, serta memastikan keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan, penulis akan melampirkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Tujuannya adalah untuk menekankan kebaruan, orisinalitas dan urgensi dari pengembangan keilmuan terkait peneliti. Oleh karena itu, literatur yang diteliti harus sesuai, bermakna dan relevan dengan fokus penelitian.⁶

Pertama, Rani Filliastuti dalam skripsinya “*Pemberdayaan Balai Rehabilitasi Sosial PGOT/EKS. Psikotik Samekto Karti Pemalang Terhadap Pembinaan Moral Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Pemalang*”. Mahasiswa jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Semarang pada tahun 2015. Tujuan dari skripsi ini yakni untuk mengetahui strategi pembinaan

⁶ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Mataran*”, hlm 18.

Moral dan kendala yang muncul dalam strategi pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial.⁷

Kesimpulan dari penelitian Rani Filliastuti yaitu:

1. Pemberdayaan Balai Samekto Karti Pemalang melalui pengembangan kapasitas kelembagaan cukup baik. Balai Samekto Karti telah menempuh langkah-langkah untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya, baik pada tingkat sistem yaitu penguatan dengan adanya visi dan misi, terhadap dasar hukum pelaksanaan balai, penyesuaian prosedur kerja balai sesuai peraturan terbaru yaitu peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2013, tingkat enitas yaitu penguatan dengan penyesuaian struktur organisasi sesuai peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2013, komunikasi, kemitraan kerja, kepemimpinan, sarana dan prasarana, dan tingkat individu yaitu penguatan yang dilakukan adalah penambahan jalur rekrutmen, peningkatan standar kompesnsi calon, pengemabangan pegawai melalui mengikutsertaan pegawai dalam pelatihan yang bersangkutan.⁸

2. Strategi pembinaan moral yang dilakukan oleh Balai Samekto Karti Pemalang dilakukan dengan beberapa kegiatan pembinaan, yaitu

⁷ Rani Filliastuti, "*Pemberdayaan Balai Rehabilitasi Sosial PGOT/EKS. Psikotik Samekto Karti Pemalang Terhadap Pembinaan Moral Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) di Pemalang*" (Semarang: Universitas Negri Semarang, 2015),t.d.

⁸ Rani Filliastuti, *ibid* , hlm 27.

pembinaan keagamaan untuk menumbuhkan nilai religious, pembinaan mental dan sosial untuk menumbuhkan nilai kesopanan dan tanggung jawab serta pembinaan keterampilan untuk menumbuhkan nilai kemandirian. Pembinaan berusaha memberikan solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok. Dalam melakukan penyampaian pembinaan moral, pembinaan menggunakan metode keteladanan dan praktek.

3. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pegawai Balai Rehabilitasi Sosial PGOT/Eks. Psikotik Samekto Karti Pamalang adalah kendala komunikasi dengan penerima manfaat, keberadaan pegawai yang kurang memadai sehingga untuk memberikan pelayanan terhadap penerima manfaat kurang optimal, serta sarana prasarana yang kurang memadai, seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana.

Adapun persamaan antara penelitian Rani Filliastuti dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar. Sedangkan perbedaannya, jika Rani Filliastuti membahas tentang pemberdayaan balai Rehabilitasi Sosial Sameko Karti Pemalang dalam melakukan pembinaan moral terhadap para Pengemis Gelangan dan Orang Terlanatr maka penulis mebahas

tentang peran Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGJ) dalam Pemberdayaan Oorang Terlantar.

Kedua, Iis Sudyanti dalam skripsinya “*Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Sosial Bina Karya Penghudi Luhur Bekasi*”. Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan peneliti juga telah mengumpulkan data, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.⁹

Kesimpulan dari penelitian Iis sudyanti pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh panti sosial Bina Karya melalui program keterampilan pengelolaan kedelai merupakan upaya untuk memberantas kemiskinan, dan meberdayakan gelandangan dan pengemis, dari tidak berdaya menjadi berdaya dan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat, dalam konteks diatas ada tiga kesimpulan sebagai berikut:

⁹ Iis Sudyanti, “*Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Sosial Bina Karya Penghudi Luhur Bekasi*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015),t.d.

1. Bimbingan keterampilan yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan praktik yang sesuai dengan kebutuhan objek lapangan kerja.
2. Proses pelaksanaan program pemberdayaan di PSBK ini sangat baik, ini terlihat adanya rencana yang matang sebelum adanya pemberdayaan.
3. Mengenai pengaruh dengan adanya bimbingan keterampilan terhadap perubahan sikap mental maupun kemampuan terhadap gelandangan dan pengemis, yaitu siswa mengetahui keterampilan yang diikuti, menguasai yang diberikan dan siswa memiliki kemampuan dan skill yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁰

Adapun persamaan antara penelitian Iis Sudiyanti dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis, sedangkan perbedaannya yaitu jika Iis Sudiyanti membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat Gelandangan dan Pengemis dalam Program Keterampilan Pengelolaan Kedelai maka penulis membahas peran Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGJ) Palembang dalam Pemberdayaan Orang Terlantar.

¹⁰ Iis Sudiyanti, *ibid*, hlm 60.

Ketiga, Rizky Dwitanto Putro dengan judul “Pembinaan Pegemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial (Samekto Karti) Pemalang”.skripsi ini membahas tentang bagaimana pembinaan PGOT di Balai Rehabilitasi “Samekto Karti” Pemalang dan faktor-faktor pendukung dan penghambat berikut cara pengangan pembinaan PGOT di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”.¹¹

Kesimpulan dari penelitian Rizky Dwitanto Putro yaitu:

1. Pembinaan PGOT di Balai Rehabilitasi Sosial “Semekto Karti”

Pemalang, meliputi:

- a. Pembinaan atau rehabilitasi prilaku adalah bagian dari proses rehabilitasi sosial melalui pelayanan perubahan prilaku baik berupa pendidikan bela Negara maupun bimbingan mental lainnya agar siap menerima kegiatan selanjutnya.
- b. Pembinaan atau rehabilitasi karya adalah bagian dari rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan agar sasaran penanganan dapat menjadi manusia produktif sehingga mampu menolong dirinya sendiri dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

¹¹ Rizky Dwitanto Putro, *“Pembinaan Pegemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial (Samekto Karti) Pemalang”*, skripsi (Semarang: Universitas Negri Semarang, 2015),t.d.

- c. Pembinaan atau rehabilitasi sosial psikologi merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin mengembalikan kondisi mental psikologi dan sosial agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya didalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
 - d. Rehabilitasi pendidikan juga merupakan bagian dari rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan penambahan pengetahuan melalui upgrading untuk mendukung pengembalian dan menentukan bentuk jenis keterampilan.
2. Faktor pendorong, faktor penghambat dan cara penanganan
- a. Faktor pendorong yang ditemui dalam pembinaan PGOT di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang antara lain yaitu adanya kerja sama lintas sektoral dengan instansi-instansi terkait dan adanya buku penunjang yang digunakan untuk mengisi kegiatan pembinaan.
 - b. Faktor penghambat yang ditemui yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti: belum mempunyai meja kursi untuk keterampilan, ruang aula yang kurang untuk bimbingan, alat untuk olahraga dan kesenian belum lengkap, kurang lengkapnya peralatan untuk keterampilan, penyaluran penerimaan manfaat untuk transmigrasi sangat kecil.

- c. Secara umum, cara penanganan faktor penghambat yaitu dengan melaksanakan tugas pokok fungsi secara fokus dan komitmen, memperkuat hubungan kerja sama lintas sektoral dan mamaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada.¹²

Adapun persamaan antara penelitian Rizky Dwitanto Putro dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Rehabilitasi Sosial pada Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar. Sedangkan perbedaannya yaitu, jika Rizky Dwitanto Putro membahas tentang pembinaan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar sedangkan penulis membahas tentang Peran Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGJ) Palembang dalam Pemberdayaan Orang Terlantar.

Keempat, Roisatu Masrurah, “*Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh UPT Panti Karya di Kota Semarang*”. Mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015.¹³ penelitian Roisatu Masrurah menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang baku, yang bersifat berupa fakta-fakta di lapangan penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan

¹² Rizky Dwitanto Putro, *ibid*, hlm 77.

¹³ Roisatu Masrurah, “*Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh UPT Panti Karya di Kota Semarang*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015),t.d.

data yaitu interview (wawancara) observasi dan dokumentasi, dan teknik penentuan informan peneliti ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang digunakan untuk memnentukan seseorang menjadi sample atau tidaknya didasarkan dengan tujuan tertentu.

Kesimpulan dari penelitian Roisatu Masrurah yaitu:

1. Proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis oleh UPT Panti

Karya yaitu:

- a. Pendataan dan pembagian kelompok yakni diadakannya pendataan terhadap calon kelayan. Kelayan adalah sebutan untuk pasien di UPT Panti Karya, dimana para pasien tersebut adalah gelandangan dan pengemis yang kebanyakan adalah psikotik. Sedangkan pendataan yang dilakukan seperti nama, tempat asal, dan keluarga, sedangkan pengelompokan dilakukan untuk mengetahui dan pembagian tempat sesuai permasalahan kelayan. Pengelompokan yang ada di UPT Panti Karya seperti kelas A untuk kelayan rendah, kelas B untuk kelayan sedang dan kelas C untuk kelayan tingkat tinggi.
- b. Penambahan pengetahuan dan terapi obat yakni diberikan pengetahuan untuk kelayan sperti kegiatan sehari-hari yang dilakukan, kegitan-kegiatan tersebut yakni mandi, tata cara makan, memakai baju, membersihkan tempat tidur dan lainnya.

Sedangkan terapi obat yaitu pemberian obat untuk kelayan agar dapat sembuh dan tidak cepat kumat kepada gangguan jiwa.

- c. Pendidikan keagamaan yakni pendidikan yang diberikan kepada para kelayan seperti adzan, sholat berjamaah, berdo'a, iqomah dan lainnya.
 - d. Pelatihan keterampilan yakni pemberian keterampilan kepada kelayan seperti membuat kalung pernak-pernik, sapu lidi, sulak, dan bercocok tanam.
 - e. Kegiatan olahraga yakni untuk membantu kebugaran fisik para klien, serta membantu menggerakkan sistem motorik dari otak yang dimiliki klien.
 - f. Pemulangan yakni mengantar pasien yang sudah normal, baik itu komunikasinya, intraksinya dengan lingkungan dan mempunyai pola pikir yang sudah normal.¹⁴
2. Hasil pemberdayaan terhadap gelandangan dan pengemis oleh UPT Panti Karya di Kota Yogyakarta.
- a. Mendapatkan ketrampilan yani kemandirian yang sudah didapatkan oleh para kelayan dan mampu melakukan hasil pelatihan yang sudah diberikan. Seperti halnya membuat kalung dengan pernak-pernik, bercocok tanam dan lainnya. Dimana

¹⁴ Roisatu Masrurah, *ibid*, hlm 86.

para kelayan awalnya belum bisa melakukannya, dan sekarang sudah bisa melakukannya secara mandiri. Kegiatan tersebut yaitu seperti mandi, menyapu, makan, membersihkan tempat kamar dan lain sebagainya, beberapa kelayan sudah dapat melakukannya dengan sendiri.

- b. Aktivitas keagamaan lebih baik yakni kegiatan keagamaan yang sudah dapat dilakukan oleh para kelayan dengan mandiri, seperti wudhu, shalat berjamaah, adzan, iqomah, berdo'a dan lainnya. Setelah para kelayan mendapatkan pemberdayaan maka mereka dapat melakukannya dengan sendiri.¹⁵

Adapun persamaan antara penelitian Roisatu Masrurah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan yang bertujuan agar mereka gelandangan dan pengemis mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak dari pada kehidupan sebelumnya. Sedangkan perbedaannya yaitu, jika penelitian Roisatu Masrurah membahas tentang Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis maka penulis lebih fokus pada peran Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGJ) dalam Pemberdayaan Orang Terlantar.

¹⁵ Roisatu Masrurah, *ibid*, hlm 87.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori yang dianggap relevan, dengan objek analisis suatu penelitian. Sebagai alat teori dipilih yang paling cocok, paling efektif, baik dan mengena terhadap permasalahan yang ada. Dalam penelitian teori yang paling relevan, Nyoman Khuta Ratna meyakini bahwa teori tersebut didasarkan pada hakikat objeknya, maksudnya objeknya yang menentukan teori mana yang paling relevan.¹⁶

1. Peran

Pengertian Peran

Secara etimologi peranan berasal dari kata “peran”. Kata ini ditambahkan dengan akhiran, sehingga menjadi kata peranan yang berarti sesuatu yang memegang, pimpinan terutama karena sesuatu hal atau peristiwa. Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia, terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peranan adalah suatu konsep dari status. Menurut Marton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku, yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Lavinso menyatakan peranan menyangkup tiga hal yaitu antara lain:

¹⁶ Andi Prastowo, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta : Ar Ruzz media, 2011). Cet 1, hlm 169-170.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

2. Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari bahasa asing yaitu “*empowerment*”, pemberdayaan dapat disamakan dengan pengembangan dalam batasan-batasan tertentu. Pemberdayaan atau pengembangan lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan agar, dapat memiliki dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dengan itu proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan sebuah ruang

¹⁷ Efanke Y. Pioh, “Peran Pengasuh dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Dipanti Sosial Bartemeus Manado”, Jurnal Acta Diurna, Vol. 4, No. 1 (2017), hlm 3.

kepada masyarakat pengembangan dan pemberdayaan akan yang memiliki kualitas.¹⁸

Menurut Jim Ife yang dikutip oleh Mubasyaroh pemberdayaan merupakan penyediaan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kepastian mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan yang lebih baik.¹⁹

Menurut Vitayala yang dikutip oleh Zubaedi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*), masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-P (Pendampingan, Penyuluhan, dan Pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespons dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketetapan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat.²⁰

Untuk pekerjaan sosial dalam melakukan pemberdayaan dapat

¹⁸ Adib Khairil Musthafa, “Pemberdayaan Anak Jalanan” (*Studi kasus di Komunitas Save Street Child Malang*), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm 29.

¹⁹Mubasyaroh, “Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam”, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm 60.

²⁰Zubaedi, “Pengembangan Masyarakat Wacana& Praktik”, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm 79.

dilakukan melalui 3 aras yaitu aras mikro, aras mezzo, dan aras makro atau matra pemberdayaan (*Empowerment Setting*).

Adapun penjelasan sebagai berikut :

1. Aras Mikro, pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress managemen*, *crisis intervention*. Tujuan utama adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
2. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Larage System Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.²¹

²¹ Edi Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*" (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 66-67.

3. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Adi (2003) tahapan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan (Engagment)

Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan. *Pertama*, penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat, yang bisa juga dilakukan

oleh *Community Worker*. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim, mengenai pendekatan apa yang akan dipilih, penyiapan petugas lebih diperlukan lagi bila dalam proses pemberdayaan masyarakat, tenaga yang dipilih memiliki latar belakang yang berbeda antara satu sama lain. Seperti: pendidikan, agama, suku dan strata dan penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara nondirektif.²²

2. Tahap Pengkajian

Proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key Person*), tetapi juga dapat melalui kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang

²² Skripsi Ahmad Nursahri, *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Melalui Program Keterampilan Monitor Motor di Panti Sosial Bina Karya (Psbk) "Pangudi Luhur" Bekasi*, (2011) hlm 19.

dirasakan (*Felt Needs*), dan juga sumberdaya yang dimiliki klien atau lebih tepatnya jika menggunakan SWOT, dengan melihat kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weaknesses*), kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Threat*).

3. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*Designing*)

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah, secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi (*Designing*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana yang akan dilakukan.²³

5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (*Implementasi*)

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama

²³ Skripsi Ahmad Nursahri, *ibid*, hlm 19-20.

antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng atau kembali pada tahap-tahap awal.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas, terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut, diharapkan dalam jangka waktu pendek bisa terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal, dan untuk jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.²⁴

7. Tahap Terminasi (*Disengagement*)

Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan petugas tidak meninggalkan komunitas secara tiba-tiba, walaupun proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. Kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

²⁴ Skripsi Ahmad Nursahri, *ibid*, hlm 21.

4. Proses Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto, proses pemberdayaan memiliki lima dimensi yaitu:

1. *Enabling* adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat, dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.²⁵
2. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat, dalam memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi, yang tidak menguntungkan

²⁵ Skripsi Rezky Ramadhan, "Pemberdayaan Anak Binaan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar" (Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Untia, Desa Nelayan Kota Makassar), (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm 36.

masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.²⁶

4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah, agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan, antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

5. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto. tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak keberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktural yang tidak adil). Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah:

²⁶ Skripsi Rezky Ramadhan, *ibid*, hlm 37.

1. Mendorong, memotivasi meningkatkan kesadaran akan potensinya, dan menciptakan iklim suasana untuk berkembang.
2. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki untuk langkah-langkah yang positif
3. Penyediaan berbagai masukan, dan pembukaan akses kepeluang-peluang. Upaya pokok yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dengan fasilitas-fasilitasnya.²⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa inti dari pemberdayaan adalah pemunculan daya atau penguatan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembangunan lebih dominan dan dalam pelaksanaannya peranan masyarakat lebih diutamakan. Hal ini mungkin dicapai dengan menguatkan kapasitas mereka melalui pemberian kesempatan, keahlian dan pengetahuan sehingga mereka mampu untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki atau dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan

²⁷ Ahmad Nursahri, *op.cit*, hlm 26.

membangkitkan kesadaran, akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁸

C. Orang Terlantar

Orang terlantar diklarifikasikan menjadi 3 yaitu Gelandangan, Pengemis dan Orang Degan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai berikut :

1. Gelandangan

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.²⁹ Frankish et al. mendefinisikan gelandangan adalah sebagai kontinum, yang terdiri dari orang yang berisiko tidak memiliki rumah sendiri dan menjalani hidup dan tidur di jalanan.³⁰

²⁸ Nunu Heryanto, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Paud Nonformal”, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, (2009), Vol. 4, No. 2, hlm 3.

²⁹ Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesia No. 16 Tahun 2019, “Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Sosial Republic Indonesia”, hlm 5.

³⁰ Muhammad Wafi Ramli, Sharifah Rohaya Sheikh Dawood, “Memahami Permasalahan Golongan Terpinggir di Bandar: Kajian Kes Gelandangan di George Town, Pulau Pinang”, Jurnal Pendidikan, Vol. 5 No. 2 (2017), hlm 80.

2. Pengemis

Pengemis berasal dari kata “emis“ di tambah awalan “peng” menjadi pengemis yang artinya orang yang meminta-minta. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pengemis tidak mempunyai akar kata akan tetapi, merupakan sinonim dari peminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu meminta artinya bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan memerlukan, menumpulkan.³¹

- Faktor-faktor munculnya gelandangan dan pengemis

Masalah sosial dan ekonomi sulit dihindari keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, yang berada didaerah perkotaan adalah pemicu munculnya gelandangan dan pengemis yang ada pada saat ini, munculnya gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan intrasi, dari berbagai masalah yang ada seperti halnya kemiskinan, pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja dimiliki, lingkungan sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

³¹ Skripsi Siti Nurmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pengemis*”, (2016), hlm 9.

a) Faktor kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, serta jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

b) Faktor pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan, pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

c) Faktor keterampilan kerja

Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

d) Faktor sosial budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis

e) Rendahnya harga diri

Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk meminta-minta.³²

³² Ahmad Nursahri, *op.cit*, hlm 28.

f) Sikap pasrah pada nasib

Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

g) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat pada peraturan dan norma sehingga mereka bebas melakukannya, yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis adalah salah satu mata pencaharian.³³

h) Masalah kesehatan

Dari segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga Negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah. Akibatnya rendah gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan, Selain permasalahan diatas ada berbagai dampak yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis antara lain:

³³ Ahmad Nursahri, *Op.cit*, hlm 29.

i) Masakah lingkungan

Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal diwilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal seperti: taman-taman, bawah jembatan dan pinggiran kali. Oleh karena itu kehadiran mereka di kota-kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketengan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.

j) Masalah kependudukan

Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran dijalan-jalan dan tempat umum, kebanyakn tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besr mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah.

k) Masalah keamanan dan ketertiban

Maraknya gelandanagn dan pengemis disuatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, serta mengurangi keamanan dan ketrtiban di daerah tersebut.³⁴

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan prasaan yang

³⁴ Ahmad Nursahri, *Ibid*, hlm 30.

termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa sehingga seseorang berpotensi mengalami gangguan jiwa, menurut Mosanya et al mengungkapkan kondisi klien yang tidak produktif, dan tidak berpenghasilan menimbulkan sikam dimasyarakat bahkan keluarga dan mempengaruhi sigma diri sehingga klien cenderung mengalami harga diri rendah, pendidikan rendah, tidak bekerja dan tidak ada penghasilan memberikan kontribusi menurunnya harga diri dan mempengaruhi kualitas hidup klien.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) perlu mendapatkan rehabilitasi yang pantas guna meningkatkan kembali kualitas hidupnya. Upaya rehabilitas bertujuan untuk mencapai perbaikan fisik dan mental sebesar-besarnya, penempatan atau penyaluran dalam pekerjaan dengan kapasitas maksimal, penyesuaian diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berswadaya, swasembada atau mandiri dan berguna.³⁵

³⁵ Bambang Suko Winarno, “Analisis Layanan Peningkatan Kalitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”, *Jurnal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm 134-135.

D. Landasan Teori

Dalam menyusun penelitian ini digunakan teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu teori solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah kesetiakawanan atau kebersamaan, dalam kepentingan bersama serta rasa simpati terhadap suatu kelompok tertentu. Solidaritas muncul ketika individu merasa cocok terhadap individu yang lain yang akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan bersama untuk saling berkomitmen dalam suatu tujuan.³⁶

Solidaritas Sosial menurut Paul Johnson yaitu solidaritas yang menunjukkan pada suatu keadaan, hubungan antar individu atau kelompok yang didasarkan perasaan moral, kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.³⁷ Pembagian kerja memiliki implikasi yang sangat besar terhadap struktur masyarakat. Menurut Emile Durkheim mengartikan Solidaritas itu adalah keadaan saling percaya antara para anggota, dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya antara para anggota, dalam suatu kelompok atau komunitas, mereka akan menjadi satu atau menjadi persahabatan, menajadi saling hormat menghormati,

³⁶ Mifdal Zusron Alfaqi, *Memahami Indonesia Melalui Perpektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas*, "Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", Vol 28, No 2, (2015), hlm 113.

³⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1986), hlm 181.

menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama.³⁸

Kajian Durkheim tentang solidaritas sosial dalam bukunya “*The Division Of Labour In Society*” merupakan upaya Durkheim dalam mengkaji satu gejala yang sedang melanda masyarakat yaitu pembagian kerja. Emile Durkheim menamakan hal pembagian kerja tersebut dengan sebutan solidaritas. Ada sejumlah istilah yang erat kaitannya dengan konsep solidaritas sosial, yang dibangun Sosiologi Berkebangsaan Perancis ini, diantaranya integrasi sosial (*sosial integration*) dan kekompakan sosial. Solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologi.

Dengan sederhana Emile Durkheim begitu tertarik mengenai proses dimana perubahan solidaritas sosial bisa terbentuk, dalam kata lain perubahan-perubahan cara masyarakat bertahan dan juga bagaimana anggotanya melihat dirinya menjadi bagian yang utuh. Emile Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat, manusia memerlukan solidaritas. Ia membedakan antar dua tipe utama solidaritas yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik :

1. Solidaritas Mekanik

³⁸ Saidang, Suparman, “*Pola Pembentukan Solidaritas Sosial Dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar*”, Jurnal Pendidikan, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm 123.

Solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Menurut Durkheim solidaritas mekanik dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang dinamakannya “segmental”. Pada masyarakat ini belum terdapat pembagian kerja yang berarti: apa yang dapat dilakukan seseorang anggota masyarakat biasanya dapat dilakukan pula oleh orang lain. Dengan demikian tidak terdapat kesalingtergantungan antara kelompok berbeda, karena masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lainnya.

2. Solidaritas Organik

Pada masyarakat dengan solidaritas organik, masing-masing masyarakat tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, melainkan ditandai oleh kesalingketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Solidaritas organik merupakan suatu sistem terpadu, yang terdiri atas bagian yang saling tergantung laksana bagian suatu organisme biologi. Solidaritas organik ini yang didasarkan pada hukum dan akal.³⁹ Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar, karena pembagian kerja mulai meluas kesadaran kolektif pelan-pelan mulai hilang, dimana

³⁹ Kamanto Sunarto, “*Pengantar Sosiologi*”, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm 6-7.

tiap orang merasa dirinya semakin berbeda dalam kepercayaan, pendapat dan juga gaya hidup. Solidaritas organik didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian kerja, yang memungkinkan dan juga mengarahkan bertambahnya perbedaan (kepercayaan, pendapat, sikap) dikalangan individu.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa solidaritas sosial adalah adanya saling percaya, cita-cita bersama, kesetiakawan, dan rasa sepenanggungan diantara individu sebagai anggota kelompok. Solidaritas sesungguhnya mengarah pada keakraban atau kekompakan (kohesi) dalam kelompok. Dalam perpektif sosiologi, keakraban hubungan antara kelompok masyarakat itu tidak hanya merupakan alat dalam rangka usaha mencapai atau mewujudkan cita-citanya, akan tetapi justru keakraban hubungan sosial tersebut, sakaligus merupakan salah satu tujuan utama dari kehidupan kelompok masyarakat.⁴⁰

Untuk memberdayakan Gelandangan, Pengemis Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), perlu dilakukannya strategi yaitu rehabilitasi sosial kemudian pengembangan sosial atau pemberdayaan

⁴⁰ Hamid Badawi Hasan, “*Solidaritas Pemuda Perkotaan di Yogyakarta*” (*Karang taruna di Kampung RW 01 Suryowijayan Kecamatan Mantrijeron*), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2016), hlm 12.

masyarakat. Dalam melakukan pembangunan atau pengembangan masyarakat perlu adanya sebuah solidaritas, guna mencapai tujuan atau meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori solidaritas sosial dari sosiolog Emile Durkheim. Secara garis besar peneliti akan menggunakan konsep yang telah dirumuskan oleh Emile Durkheim, ini sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian tentang Peran Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGI) Palembang dalam Pemberdayaan Orang Terlantar.

Dalam hal ini pentingnya untuk memberdayakan orang terlantar di Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGI) Palembang. Dengan menerapkan solidaritas yang dapat mengembalikan nilai-nilai solidaritas sosial pada orang terlantar yaitu gelandangan pengemis dan orang dengan gangguan jiwa, agar senantiasa hidup saling menghargai, serta menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lainnya, demi terciptanya tujuan bersama dalam pemberdayaan orang terlantar.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa solidaritas yaitu menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok

dimasyarakat. Berdasarkan hal ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melihat Peran Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGJ) Palembang dalam pemberdayaan orang terlantar. Jadi, teori solidaritas sosial ini relevan dengan pembahasan yang akan dilakukan peneliti.